PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KADARUDIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**
3. NHK : **921761**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/70 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 233.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 115 Tahun 2003, WARISAN Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 57.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	150.000.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.560.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.041.560.000
III.	HUTANG	Rp.	141.846.032
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.899.713.968

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.